

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Setiap negara baik negara maju maupun berkembang selalu memperhatikan kualitas pendidikan di negaranya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas karena sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan negara itu sendiri. Sumber daya yang berkualitas dapat mengelola kekayaan negara dengan baik, hal ini juga dapat mewujudkan tujuan dari pembangunan manusia yaitu menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan kreatif agar dapat menikmati hidup yang lama. Karena itu pentingnya pendidikan yang berkualitas sebagai sarana pembentukan karakter pendorong kemajuan bangsa. Kualitas pendidikan merupakan tingkat kecerdasan suatu bangsa dalam pelaksanaan pendidikan yang mengukur sejauh mana keberhasilan yang dicapai negara dalam menyelenggarakan pendidikan. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pendidikan yaitu dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi indeks pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Menurut Badan Pusat Statistik Penelitian (2020) “IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk di Indonesia, Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis yang dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).” Pengukuran mengenai pembangunan manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan ide baru tentang pengukuran pembangunan manusia yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia akan lebih berfokus pada aspek-aspek penting bukan hanya sekedar pendapatan perkapita. Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala untuk mengukur kualitas sumber daya manusia. Menurut Badan Pusat Statistik (2020) “IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan

untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk di Indonesia.

Kualitas Pendidikan menjadi syarat penting bagi kemajuan suatu negara dengan adanya pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan pendidikan dapat membentuk karakter manusia. Perlu adanya kualitas pendidikan yang merata di setiap daerah di Indonesia, jika setiap provinsi di Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang baik maka akan mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia yang setara dan mengurangi kesenjangan. Karena itu, segala upaya akan dilakukan oleh negara Indonesia untuk meningkatkan IPM dengan kualitas pendidikan yang baik dan merata di setiap provinsi agar tidak adanya ketertinggalan dan kesenjangan tingkat pembangunan manusia di setiap provinsi Indonesia. Oleh karena itu setiap daerah di Indonesia membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam perencanaan pembangunan manusia dan untuk mengalokasikan anggaran daerah yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Masing-masing daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Saat ini Indonesia memiliki 34 provinsi yang diantaranya memiliki status daerah istimewa yakni Daerah Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua dan Daerah Khusus Jakarta. Provinsi yang memiliki penduduk terbanyak yakni Provinsi Jawa Barat dengan 46 juta orang sedangkan untuk provinsi dengan jumlah penduduk terkecil yakni Kalimantan Utara dengan 663 ribu orang, karena itu Indonesia sendiri menjadi negara urutan ke-4 di Dunia dengan penduduk terbanyak sebesar 274,9 juta di tahun 2020. Hal ini menjadi perhatian bagi negara Indonesia karena dengan adanya sumber daya manusia yang banyak dapat menjadi aset bagi negara dan diharapkan dengan adanya pembangunan manusia dari segala aspek salah satunya pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap kemajuan negara Indonesia.

Berikut IPM Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021 dengan rincian setiap komponennya.

Tabel 1.1

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2015-2021

Komponen	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	70,78	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,55	12,68	12,85	12,92	12,95	12,98	13,08
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54
Pengeluaran per Kapita	Tahun	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156
IPM		69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS (2021)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa IPM Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat yang tentunya memberikan harapan bahwa upaya pemerintah berdampak positif terhadap ketiga indikator IPM karena dari tahun 2015 hingga tahun 2021, tingkat persentase IPM mengalami kenaikan walaupun tingkat pertumbuhannya tidak signifikan. Diantara 34 provinsi di Indonesia, DKI Jakarta dan D.I Yogyakarta memiliki tingkat IPM tertinggi dengan masing-masing sebesar 81,11 dan 80,22 sedangkan untuk IPM terendah yaitu dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat dengan IPM masing-masing sebesar 65,26 dan 60,26, Hal ini menjadi perhatian bagi negara Indonesia untuk memberikan fasilitas dan akses yang sama di setiap daerah agar tidak terjadinya ketimpangan yang semakin tinggi. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia untuk meningkatkan pembangunan manusia di setiap daerah dengan merata, Menurut laporan dari UNDP menyebutkan bahwa “ 17,4% nilai IPM dari Indonesia hilang karena ketimpangan yang lebih besar dibandingkan dengan sebagian besar negara tetangga di Asia Timur dan Pasifik”. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus berupaya untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan manusia dari berbagai komponen tersebar secara menyeluruh dan dapat memprioritaskan daerah tertinggal terlebih dahulu khususnya aspek pendidikan yang harus dilakukan secara merata di berbagai daerah. Indonesia harus memberikan akses pendidikan yang sama

seperti fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai, program-program pendidikan yang dapat memfasilitasi peserta didik yang berprestasi dan kurang mampu dan akses teknologi di setiap daerah terlebih daerah yang terpinggir. Karena selain ketimpangan pada tingkat IPM, indeks pendidikan di setiap daerah pun masih rendah dan belum merata berdasarkan data dari Open Data Jabar (2018) bahwa indeks pendidikan tertinggi dimiliki oleh DI Yogyakarta dengan 74.29 poin sedangkan daerah yang indeks pendidikannya terendah yaitu Papua dengan 51.92 poin, selain itu masih banyak daerah yang memiliki indeks pendidikan dibawah 70 poin. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah tidak merata dan belum konsisten mencapai 20%, berdasarkan data neraca pendidikan daerah bahwa pada tahun 2015-2019 hanya ada 6 daerah yang mencapai persentase anggaran pendidikan 20% yaitu antara lain Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur sedangkan baru pada tahun 2020 ada sebanyak 10 daerah yang dapat mencapai 20% sementara 18 daerah lainnya belum dapat mencapai 20%.

Adanya ketimpangan tingkat indeks pembangunan manusia dan belum meratanya pendidikan di setiap daerah Indonesia karena terjadinya kesenjangan akses pendidikan dan alokasi anggaran pendidikan yang diberikan setiap daerah. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 Ayat ke-4 menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan”.

Mengingat bidang pendidikan merupakan sektor utama yang paling banyak menyerap anggaran pemerintah daerah. Namun hal ini tidak sebanding dengan kualitas pendidikan pada IPM di Indonesia yang dapat dilihat pada komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama sekolah (RLS) yang setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang lambat selain itu menurut data Statistik Pendidikan pada tahun ajaran 2015-2021 mengkonfirmasi bahwa terdapat 865.442 siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak mampu

melanjutkan sekolah. Begitu pula sebanyak 1.602.656 peserta didik dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang harus mengulang Indonesia. Sedangkan pada tahun 2020 anggaran pendidikan Indonesia tercatat sebesar Rp508,8 triliun namun angka putus sekolah dan angka mengulang meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut merupakan keadaan nyata bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dan tidak merata di setiap daerah padahal anggaran pendidikan. Dari fenomena tersebut bahwa alokasi anggaran urusan pendidikan belum efektif dan efisien serta tidak sebandingnya alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan yang berdampak pada rendahnya indeks pendidikan Indonesia. Penulis dalam hal ini bermaksud akan meneliti bagaimana hubungan antara alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan pada IPM di setiap daerah Indonesia dengan demikian penulis berupaya untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Alokasi Anggaran Pendidikan dengan Kualitas Pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2015-2020”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Alokasi anggaran pendidikan yang tidak sebanding dengan kualitas pendidikan di Indonesia.
2. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Indonesia
3. Terjadinya ketimpangan kualitas pendidikan pada setiap daerah di Indonesia.
4. Alokasi anggaran pendidikan di setiap daerah belum konsisten mencapai 20%.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan fenomena yang diambil dan diidentifikasi, maka permasalahan dibatasi pada pengalokasian anggaran pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah pada komponen pendidikan di IPM 2015-2020.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan pada IPM di Indonesia pada tahun 2015-2020?
2. Seberapa besar tingkat hubungan antara alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan pada IPM di Indonesia pada tahun 2015-2020?
3. Bagaimana keterkaitan alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan pada ilmu ekonomi pendidikan?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada batasan masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan Indonesia di tahun 2015-2020.
2. Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan Indonesia di tahun 2015-2020.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana keterkaitan alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan pada ilmu ekonomi pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta tujuan yang diuraikan sebelumnya, diharapkan agar penelitian ini dapat memberi dan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Menambah pengetahuan dan gambaran mengenai keadaan pendidikan di Indonesia berdasarkan kualitas pendidikan dan tingkat IPM.

- b. Menambah pengetahuan mengenai pengalokasian anggaran pendidikan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meneliti adakah hubungan antara alokasi anggaran pendidikan dan kualitas pendidikan pada IPM di Indonesia.
- d. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan solusi dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPM dan kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran pendidikan yang tepat.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan melalui penelitian ini, mahasiswa dapat menambah pengetahuan mengenai keadaan kualitas pendidikan di Indonesia dan alokasi anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah serta menambah pengetahuannya dengan keterkaitan penelitian ini dengan mata kuliah ekonomi pendidikan.

b. Bagi Pendidik

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pendidik dapat ikut mendukung dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dengan memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan gambaran mengenai hubungan alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan serta tingkat IPM dan keterkaitannya dengan mata kuliah ekonomi pendidikan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran dan memberikan batasan dari istilah-istilah yang diberlakukan, maka peneliti mendefinisikan variabel-variabel yang terdapat pada judul penelitian di antaranya sebagai berikut:

a. Anggaran Pendidikan

Menurut Fathony, A.A dan Prianty, Fety (2019, hlm.1) Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian Negara atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Sedangkan Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi.

b. Kualitas Pendidikan

Menurut Supriyanto dalam Sinambela, L.P (2017, hlm.586) :

Mutu atau kualitas memiliki arti kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan. Karena kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi kualitas pendidikan ialah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan tersebut mencapai keberhasilan.

Kualitas Pendidikan menurut Permendiknas No. 63 (2009) bahwa “Tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional”.

c. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) “IPM merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup penduduk di Indonesia, Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis yang dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)”.

Menurut UNDP dalam Palayukan, Marselus (2019, hlm. 76) mengatakan bahwa Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*a process of enlarging people's choices*).

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator atau tolak ukur

yang digunakan untuk mengukur dan melihat perkembangan kualitas dimensi pendidikan, dimensi ekonomi dan dimensi kesehatan.

G. Sistematika Skripsi

Agar mempermudah dalam melihat dan mengetahui pembahasan pada skripsi secara menyeluruh, maka perlu adanya sistematika penyusunan skripsi sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

a. Bagian Pembuka Skripsi

Bagian pembuka skripsi terdiri dari halaman sampul depan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, kata pengantar, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar serta daftar lampiran.

b. Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi memuat bab dan sub bab sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan skripsi. |
| BAB II | KAJIAN TEORI |
| | Bab ini terdiri dari kajian teori yang berisi deskripsi teoritis yang memfokuskan pada hasil kajian atas teori, konsep, kebijakan dan peraturan yang ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu lalu dilanjutkan dengan kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan dari variabel-variabel dalam penelitian. |
| BAB III | METODE PENELITIAN |
| | Bab ini terdiri dari pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data serta prosedur penelitian. |

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menyampaikan dua hal utama yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta bagian pembahasan berisi temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan hasil penelitian lalu dilanjutkan bagian saran yang merupakan rekomendasi ditujukan kepada para pembuat kebijakan, pengguna atau kepada peneliti berikutnya.

c. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang merupakan daftar buku, jurnal ilmiah, majalah ilmiah serta artikel sebagai acuan dalam pengumpulan data dilanjutkan pada bagian lampiran yang merupakan keterangan atau informasi tambahan yang dianggap perlu untuk menunjang kelengkapan skripsi.